

Judul : Sekolah rakyat perlu sosialisasi & koordinasi dengan banyak pihak
Tanggal : Senin, 11 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Sekolah Rakyat Perlu Sosialisasi & Koordinasi Dengan Banyak Pihak

Program Sekolah Rakyat secara resmi diluncurkan pada bulan Juli 2025. Sejak diresmikan, program ini sudah menimbulkan banyak drama dalam proses pelaksanaannya.

Baru-baru ini, Menteri Sosial Syaifulah Yusuf mengumumkan sudah ada 143 calon guru yang secara resmi mengundurkan diri. "Ada 143 guru mundur," ungkap Syaifulah Yusuf.

Belum selesai masalah mundurnya ratusan para guru, sudah ada 115 siswa Sekolah Rakyat yang juga mengundurkan diri. "Kami menghormati keputusan tersebut," katanya.

Khusus untuk guru, Gus Ipu-biasa Syaifulah Yusuf disapa mengundurkan diri ratusan guru tidak mengganggu proses belajar-mengajar di Sekolah Rakyat. Hal ini dikarenakan, guru yang mundur mayoritas ditempatkan di Sekolah Rakyat yang belum beroperasi.

"Tapi saya pastikan bahwa guru-guru yang mengundurkan

diri sudah ada penggantinya dan tidak mengganggu proses belajar-mengajar," ungkapnya.

Gus Ipu juga memastikan jika program Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai jalurnya meski terdapat sejumlah guru dan siswa yang mengundurkan diri dari kegiatan belajar-mengajar di program yang kini telah beroperasi di 70 titik tersebut.

"Mereka yang mundur tidak lantas membuat proses berhenti. Alhamdulillah kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung di titik-titik yang sudah beroperasi," kata Syaifulah usai meninjau kegiatan Sekolah Rakyat di SRMP 9 Bandung, Kompleks Wyataguna, Bandung, Sabtu malam.

Ditegaskan Gus Ipu, Sekolah Rakyat akan tetap berjalan pada 15 Agustus mendatang. Program ini dirancang tanpa tes akademik, namun diganti dengan pemetaan bakat atau talent mapping sebagai dasar pembelajaran ini.

"InsyaAllah pada 15 Agustus nanti akan mencapai 100 titik kalau nanti sarprasnya sudah siap, dan menyusul 59 titik tambahan pada September," katanya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abdul Wachid mengatakan wajar jika dalam proses pelaksanaan Sekolah Rakyat banyak permasalahan, seperti mundurnya para guru. "Sekolah Rakyat kan masih tahap awal," ujarnya.

Sementara, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim menilai mundurnya ratusan guru dan siswa karena minimnya sosialisasi dari Kemensos. "Kemensos tidak siap dalam menjalankan program Sekolah Rakyat beresama," katanya.

Untuk melihat lebih jauh pandangan Abdul Wachid dan Satriwan Salim terkait mundurnya ratusan guru Sekolah Rakyat. Berikut wawancaranya.

SATRIWAN SALIM, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G)

Koordinasinya Harus Segera Ditingkatkan



Kemensos harus berkordinasi dengan berbagai pihak. Seperti Mendikdasmen dalam mempersiapkan guru yang berkualitas dan instansi lainnya.

Ratusan guru di Sekolah Rakyat mengundurkan diri. Alasannya beragam. Ada karena jaraknya, domisili dan sebagainya. Apa tanggapan Anda?

Memang, kalau kita lihat proses sosialisasi dan perencanaan Sekolah Rakyat itu cukup singkat. Termasuk proses rekrutmen, proses pelatihan terhadap guru-gurunya, sehingga banyak informasi yang tidak utuh termasuk juga persiapan skill guru-gurunya.

Maksud Anda, Kemensos belum siap untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat ini?

Kami melihat memang kurang sosialisasi dan memang tidak siap Kementerian Sosialnya karena dalam mengelola sekolah beresama tentu sangat kontras dengan sekolah reguler biasa.

Nah, kami dari P2G melihat guru-guru di sekolah rakyat ini berasal dari sekolah negeri biasa, gitu. Bukan dari sekolah negeri beresama.

Dan setuju saya, memang tidak ada guru-guru yang belajar belakang rekrutmen dari sekolah negeri beresama.

Jadi, guru yang direkrutmen di Sekolah Rakyat belum ada pengalaman?

Guru di Sekolah Rakyat betul-betul baru. Ditambah lagi mereka tidak punya pengalaman di dalam mengelola sekolah beresama, gitu.

Kami berharap waktu awal rekrutmen guru diberikan sosialisasi dulu, terkait dengan bagaimana sekolah rakyat ini diatur, dikelola dan polanya seperti apa dan sebagainya. Setelah direkrut, baru diberikan pelatihan-pelatihan.

Jika banyak pelatihan, berarti butuh waktu, dong?

Memang, dalam membentuk dan membangun Sekolah Rakyat butuh waktu yang cukup panjang, tidak asal ujung-ujungnya berapa bulan jadi.

Kalau kemarin kami melihat waktunya sangat mendesak dan mepet sekali. Kalau tidak salah di bulan Juni dan bulan Juli dan mulai intens kan sekitar bulan November hingga Desember terkait dengan rencana sekolah rakyat ini.

Karena program Sekolah Rakyat sudah berjalan, apa yang harus dilakukan Kemensos dalam memperbaikinya?

Kemensos harus berkordinasi dengan berbagai pihak. Seperti Mendikdasmen dalam mempersiapkan guru yang berkualitas dan instansi lainnya. ■ **REDA**

ABDUL WACHID, Wakil Ketua Komisi VIII DPR

Wajar, Sekolah Rakyat Masih Tahap Awal



Mundurnya ratusan calon guru Sekolah Rakyat tidak bermasalah bagi proses pendidikan, karena sudah diganti oleh para calon guru yang lain.

Ratusan guru Sekolah Rakyat mengundurkan diri. Bagaimana pandangan Anda?

Setelah saya, banyak calon guru lain yang masih ingin mengajar di Sekolah Rakyat.

Tapi, ada tuduhan banyaknya guru yang mundur karena Kemensos minim sosialisasi dan belum siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat itu kan masih tahap awal dan butuh banyak adaptasi dan penyesuaian dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, Sekolah Rakyat juga masih menggunakan fasilitas yang ada seperti Gedung Balai Diklat.

Apakah sudah ada penggantinya?

Mundurnya ratusan calon guru Sekolah Rakyat tidak bermasalah bagi proses pendidikan, karena sudah diganti oleh para calon guru yang lain.

Apakah Sekolah Rakyat ini memang banyak peminatnya?

Setelah saya, banyak calon guru lain yang masih ingin mengajar di Sekolah Rakyat.

Tapi, ada tuduhan banyaknya guru yang mundur karena Kemensos minim sosialisasi dan belum siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat itu kan masih tahap awal dan butuh banyak adaptasi dan penyesuaian dengan berbagai situasi dan kondisi yang ada. Selain itu, Sekolah Rakyat juga masih menggunakan fasilitas yang ada seperti Gedung Balai Diklat.

Menurut Anda, wajar jika banyak kealasan dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat kan masih tahap awal, sehingga wajar dan

hal yang biasa jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sekolah Rakyat akan lebih baik dalam pelaksanaannya tahun depan karena pada tahun 2026 anggarannya sudah tersedia dan bisa membangun Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat masih membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak Kementerian dan Dinas yang terkait dengan Pendidikan, Kesehatan, Gizi dan Menengah karakter siswa.

Sesuai harapan Presiden Prabowo untuk mencetak anak bangsa yang berkualitas untuk menuju Indonesia emas 2045, maka Sekolah Rakyat dibutuhkan kerjasama antar kementerian dan Gubernur Bupati walikota di seluruh Indonesia, sebagai bukti amanah konstitusi UUD 1945 pasal 34 yakni memotong kemiskinan di negeri ini. ■ **REDA**